



## **BUPATI MAROS**

### **KEPUTUSAN BUPATI MAROS**

NOMOR : 737 / KPTS / 027 / I / 2022

### **TENTANG**

### **PENETAPAN PAKET PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2022**

#### **BUPATI MAROS,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2022 menyatakan area intervensi pengadaan barang/jasa pada indikator pelaksanaan tupoksi sub indikator reviu perencanaan Pengadaan Barang/jasa dan indikator pengendalian dan pengawasan sub indikator reviu HPS, perlu menetapkan Paket Pengadaan Barang/Jasa Strategis Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 9);
  13. Peraturan Bupati Maros Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PENETAPAN PAKET PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan paket pengadaan barang/jasa strategis Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Paket pengadaan barang/jasa strategis pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu harus memiliki kelengkapan dokumen yang disusun berdasarkan tata cara dalam Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 30 MARET 2022



**BUPATI MAROS,**

**S. CHAIDIR SYAM, S.I.P., M.H**

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Maros di Maros;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAROS  
 NOMOR : 737/KPTS/027/III/2022  
 TANGGAL : 30 MARET 2022  
 TENTANG : PENETAPAN PAKET PENGADAAN  
 BARANG/JASA STRATEGIS  
 KABUPATEN MAROS TAHUN  
 ANGGARAN 2022

**DAFTAR PAKET PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS  
 KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	PAKET PEKERJAAN	NILAI (Rp.)	KET.
1	PENINGKATAN JALAN SALOMETTI-BASSIKALLING (DAK REGULER)	15.327.429.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG RUANG RAWAT INAP VIP (DAU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LA PALALOI)	9.790.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LA PALALOI
3	PENINGKATAN JALAN CARANGKI - DICCEKENG (DAK PENUGASAN)	7.920.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
4	PENGADAAN UNIT AC, HEFAFILTER DAN INSTALASINYA	7.000.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LA PALALOI
5	PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUANG OPERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LA PALALOI (DAK FISIK RUJUKAN)	7.000.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LA PALALOI
6	PENINGKATAN JALAN SAMBUEJA - BANGA (DAK REGULER)	6.665.231.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
7	BIAYA PEMBANGUNAN GEDUNG PRODUKSI (DAK FISIK INDUSTRI)	6.000.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
8	PEMBANGUNAN GEDUNG PLUT	3.540.500.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
9	SARANA DAN PRASARANA PLUT	2.965.625.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
10	PENAMBAHAN/RENOVASI/LANJUTAN PEMBANGUNAN PKM MONCONGLOE	2.800.000.000	DINAS KESEHATAN



**H. A. S. CHAIDIR SYAM, S.I.P., M.H**